

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan posisi yang sangat strategis karena terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia juga berada pada perpotongan tiga lempeng aktif yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Karena Indonesia terletak di kawasan lempeng tektonik atau juga termasuk dalam kawasan Cincin Api, mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu kawasan rawan gempa. *Ring of fire* adalah adanya hubungan Aktivitas vulkanik menyebar dari Indonesia hingga Jepang dan dari Alaska melalui Amerika Serikat bagian barat hingga Amerika Selatan. Cincin Api dikenal juga dengan Lingkaran Magma Besar dan Indonesia merupakan puncak dari Cincin Api ini. Indonesia juga merupakan satu-satunya negara di Asia yang dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik sepanjang 40.000 kilometer sehingga rentan terhadap gempa bumi. (Aulady, dkk 2021:277).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Samodra (2013), dapat disimpulkan bahwa Pulau Sumatera dan Pulau Jawa merupakan dua daerah di Indonesia yang secara rutin mengalami aktivitas gempa bumi. Gempa bumi di kedua pulau tersebut terjadi karena adanya pertemuan lempeng Hindia Australia yang membentang di bawah lempeng Eurasia. Interaksi antara kedua lempeng tersebut memiliki perbedaan. Di Sumatera, pertemuan lempeng terjadi secara miring, sementara di Jawa terjadi secara tegak lurus.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi rawan gempa di Indonesia karena terletak di garis patahan Semangko yang merupakan perpotongan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Tujuh dari 19 ruas Sesar Semangko berada di wilayah Sumatera Barat dan akan berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah rawan. Ketujuh ruas tersebut adalah ruas Siluak ($2.25^{\circ}\text{S} - 1.7^{\circ}\text{S}$), ruas Tulisi ($1.75^{\circ}\text{S} - 1.0^{\circ}\text{S}$), ruas Sumani ($1.0^{\circ}\text{S} - 0.5^{\circ}\text{S}$), ruas Sianok ($0.7^{\circ}\text{S} - 0.1^{\circ}\text{N}$), dan ruas Sumpur ($0.1^{\circ}\text{N} - 0.3^{\circ}\text{N}$), ruas Barumon ($0.3^{\circ}\text{N} - 1.2^{\circ}\text{N}$). Segmen-segmen tersebut berpotensi menjadi sumber gempa daratan 6,8 skala Richter hingga 7,8 skala Richter (Setyahadi, dkk). Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2020, Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam tingkat risiko tinggi dengan nilai sebesar 149,53.

Dampak dari bencana gempa bumi tidak hanya menimbulkan kerusakan pada lingkungan, tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan sosial bagi penduduk yang terkena dampak tersebut. Masalah sosial yang dapat diidentifikasi secara empiris adalah ketidakstabilan keluarga yang disebabkan oleh kerusakan fisik dan lingkungan alam yang signifikan, melibatkan kehilangan tempat tinggal, aset, dan persediaan makanan. Selain itu, hubungan sosial antarwarga mungkin terpengaruh karena setiap individu merasakan beban penderitaan yang berat, yang dapat berdampak pada rentannya anak-anak muda terhadap perilaku menyimpang, seperti penjarahan barang bantuan dan pencurian di lingkungan sekitar. Kompleksitas dari permasalahan akibat bencana gempa bumi ini tentu tidak cukup jika hanya dikaji dengan satu disiplin ilmu, kerja sama antar lintas disiplin dalam mengkaji berbagai permasalahan akan menjadi suatu inovasi yang dapat memberikan solusi efektif.

Gempa bumi yang merusak dan mengakibatkan korban jiwa baru-baru ini yang terjadi di Provinsi di Sumatera Barat ialah gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman. Gempa ini terjadi pada tanggal 25 Februari 2022 yang berkekuatan 6,2 skala *Richter*. Berdasarkan informasi dari BMKG, pusat gempa berada di daratan 17 km timur laut Pasaman Barat tepatnya di Nagari Kajai Kecamatan Talamau. Gempa ini diawali dengan gempa yang berkekuatan 5,2 skala *Richter* terjadi pada pukul 08.35 WIB, kemudian pada pukul 08,39 WIB, gempa utama (*main shock*) mengguncang dengan kekuatan yang lebih besar yaitu 6,2 skala *Richter* dan disusul dengan gempa ber-skala kecil berulang kali yang dirasakan oleh beberapa masyarakat setempat yang berada dekat dengan titik lokasi gempa. Berbagai infrastruktur, sektor sosial, ekonomi, lintas sektor seperti kantor pemerintahan, lingkungan hidup, perbankan tidak terhindar dari kerusakan.

Gempa ini mengakibatkan kerugian harta dan jiwa. Tercatat sebanyak 27 orang meninggal dunia dan 457 orang mengalami luka-luka di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman. Di Pasaman Barat, tercatat sebanyak 1.111 unit rumah mengalami kerusakan berat, 1.171 unit rumah rusak sedang, dan 2.172 unit rumah rusak ringan (BNPB, 2022). Di Pasaman Barat, Salah satu lokasi yang mengalami kerusakan berat akibat bencana tersebut adalah Nagari Kajai, Kecamatan Talamau. Banyaknya kerusakan yang terjadi di Nagari Kajai bisa saja disebabkan oleh bangunan yang dirancang tanpa memperhatikan kaidah konstruksi tahan gempa, sehingga pada umumnya pemukiman mengalami kerusakan struktur yang parah bahkan bangunan roboh akibat gempa. Dampak yang terjadi akibat bencana ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dalam

jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Terkait kondisi seperti ini upaya pemulihan harus segera dilakukan, Tidak hanya sebagai upaya memulihkan masyarakat kembali ke keadaan sebelumnya, tahap pemulihan juga dapat menjadi kesempatan untuk menciptakan kondisi yang lebih aman dan berkelanjutan untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada bencana yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

Merespon kondisi yang terjadi di lapangan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menanggapi bencana tersebut dengan menetapkan status tanggap darurat terhitung mulai dari tanggal 25 Februari hingga 10 Maret 2022. Status tanggap darurat ini ditetapkan menimbang banyaknya korban terdampak dan kerusakan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Masa tanggap darurat ini ditetapkan selama 14 hari melalui surat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Pasaman Barat nomor 188.45/160/BUP.PASBAR/2022, selanjutnya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga melakukan kajian terkait langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan untuk penanggulangan bencana gempa bumi (Laporan Harian Pusdalops BNPB Jumat, 25 Februari 2022). Ini adalah bentuk respon awal dari pemerintah karena negara mempunyai tanggung jawab pertama untuk melakukan upaya pemulihan pasca bencana. Seperti dalam kebijakan nasional bidang tata kelola bencana dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 yang menyampaikan bahwasanya pemerintah merupakan penyelenggara utama dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 menjadi acuan bagi perlindungan hak dasar rakyat yang menunjuk pemerintah untuk mengemban tugas tata kelola dan pemulihan pasca bencana.

Ketika bencana berdampak pada masyarakat dan menyebabkan kerusakan infrastruktur dan sosial-ekonomi, pemerintah harus memainkan peran kunci dalam mengatur, mengkoordinasikan dan melaksanakan pemulihan pascabencana.

Upaya pemulihan di sektor perumahan merupakan hal yang sangat penting karena perumahan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Dilansir dari Pasbar, pasamanbarat.go.id (14/09/2022), pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) akan meluncurkan dana bantuan terhadap korban gempa di Kabupaten Pasaman Barat. Bupati Pasaman Barat bersama wakilnya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ada kejelasan mengenai dana bantuan pascagempa. Dana yang akan diluncurkan tersebut ditujukan terhadap rumah rusak berat yang telah diverifikasi oleh BNPB sebanyak 1.111 unit dengan bantuan Rp50.000.000 tiap rumah. Untuk kategori rumah rusak sedang sebanyak 1.171 unit akan dibantu oleh pemerintah provinsi. Hal ini tentu menjadi titik terang bagi korban gempa, mengingat banyaknya rumah masyarakat yang mengalami kerusakan.

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan biaya untuk perbaikan rumah masyarakat korban gempa, pemerintah menghadapi kritik karena keterlambatan dan kurangnya keberhasilan dalam upaya perbaikan rumah yang mencerminkan kurangnya koordinasi, penanganan yang lamban, dan kurangnya transparansi dalam alokasi sumber daya. Kritikan tersebut disampaikan oleh masyarakat lewat aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi tersebut umumnya dilakukan oleh masyarakat Nagari Kajai. Nagari Kajai sendiri merupakan wilayah yang berada di titik lokasi gempa dan wilayah yang terkena dampak paling besar. Dalam aksi demo tersebut

terdapat beberapa tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Di antara tuntutan tersebut berisi tentang persoalan pencairan dana rumah rusak berat. Dalam hal ini, masyarakat menginginkan dana dicairkan langsung ke tangan masyarakat. Artinya dalam pelaksanaan rekonstruksi rumah, masyarakat ingin melakukannya secara mandiri tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Masyarakat ingin dana itu segera dicairkan agar pelaksanaan rekonstruksi secara individu atau mandiri bisa mereka lakukan untuk mendapatkan hunian yang layak sesuai dengan pemahaman dan nilai yang mereka yakini.

Dilansir dari padang.viva.co.id (16/09/2024), pemerintah Pasaman Barat melalui Wakil Bupati Risnawanto menyatakan bahwa dana sudah berada di rekening penerima sesuai dengan SK yang diajukan. Namun, untuk mencairkannya ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh BNPB. Risnawanto juga menjelaskan masyarakat beranggapan bahwa ketika dana sudah masuk ke rekening mereka maka dana tersebut langsung menjadi hak mereka tanpa adanya regulasi tambahan.

Keterlambatan pembangunan rumah masyarakat korban gempa tidak hanya terjadi pada kategori rusak berat, perbaikan rumah kategori rusak sedang juga mengalami keterlambatan. Dilansir dari rri.co.id (15/11/2023), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sejak bulan November 2022 lalu telah mencairkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar 23 miliar rupiah lebih untuk korban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan. Namun, sampai sekarang dana tersebut belum terealisasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Usra Deni, menyatakan bahwa dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari provinsi tersebut berlaku hanya dua tahun.

Artinya, jika tidak terlaksana selama kurun waktu yang telah ditentukan, maka dana tersebut harus dikembalikan ke provinsi. Hal ini tentu akan mendatangkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat yang menjadi korban. Secara teknis, perbaikan rumah rusak sedang dan ringan akan terkendala juga jika proses perbaikan rumah rusak berat mengalami permasalahan.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah telah merealisasikan penyaluran dana stimulan dan pembangunan rumah yang siap huni. Dalam pembangunan rumah yang siap huni, pemerintah menyalurkan dana stimulan melalui tiga skema. Pertama, dalam pembangunan rumah siap huni senilai Rp 50.000.000, pemerintah bersama perusahaan yang terlibat menyediakan langkah instan bagi masyarakat dengan menyediakan rumah konsep Domus dan Rumbako. Dalam hal ini, masyarakat hanya tinggal huni tanpa perlu memikirkan material dan jasa tukang yang akan digunakan dengan catatan spesifikasi dan model rumah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Skema ini disebut dengan Reimburse Aplikator.

Kedua, dengan skema Reimbursement Mandiri. Reimbursement Mandiri menggunakan anggaran yang sama, maksimal Rp 50.000.000, namun dalam pelaksanaannya, rumah akan dibangun terlebih dahulu oleh masyarakat dengan uang sendiri. Dana akan dicairkan setelah rumah selesai dan nominal yang dicairkan sesuai dengan besaran biaya yang telah habis dalam pembangunan rumah tersebut. Pencairan dana dilakukan melalui tahapan verifikasi dan perhitungan

kembali material yang digunakan. Material yang digunakan tidak boleh menggunakan material bekas meskipun masih bisa digunakan.

Skema yang ketiga adalah Swakelola Mandiri. Melalui skema ini, masyarakat membangun rumah dengan cara sendiri namun mengikat kontrak dengan toko bangunan yang telah ditunjuk. Semua keperluan bangunan dapat diperoleh melalui toko bangunan yang terikat kontrak. Setelah rumah selesai, dana stimulan dapat dicairkan ke toko melalui rekening penerima bantuan. Besaran dana stimulan yang dapat dicairkan maksimal Rp 50.000.000, namun yang dicairkan sesuai dengan nominal yang terpakai dalam pembangunan rumah tersebut.

Tiga pilihan dalam perbaikan rumah ini diberikan oleh pemerintah tanpa adanya intervensi dan paksaan dalam menentukan pilihan. Kemudian muncul pertanyaan, dari tiga pilihan ini, model seperti apakah yang paling efektif? Jika pertanyaan ini ditujukan kepada pemerintah, tentu jawabannya adalah Reimburse Aplikator, karena prosedur yang ditempuh tidak begitu sulit. Namun, jawaban akan berbeda ketika pertanyaan itu ditujukan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan. Prosedur yang ditempuh dalam skema Reimburse Aplikator memang tidak sesulit kedua skema lainnya. Masyarakat umumnya teguh dengan pilihannya yaitu Reimbursement Mandiri atau Swakelola Mandiri meskipun melalui berbagai tahapan yang memakan waktu cukup lama. Prosedur dalam dua model ini begitu pelik dan problematik sehingga hal ini menjadi salah satu alasan keterlambatan dalam pencairan dana stimulan bagi masyarakat terdampak.

Dalam skema Reimbursement Mandiri, pencairan dana stimulan dilakukan setelah rumah selesai dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Prosedur seperti ini tentu akan mempersulit masyarakat dalam membangun rumah mereka secara mandiri sesuai keinginan mereka, mengingat dampak dari gempa sudah cukup memberikan penderitaan bagi kehidupan sosial dan perekonomian mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk membangun kembali rumah mereka dengan uang sendiri meskipun akan diganti begitu rumah selesai. Pada skema Swakelola Mandiri, kerja sama antara toko bangunan dan pemerintah di mata masyarakat terkesan seakan-akan pihak yang terlibat mencari keuntungan di tengah penderitaan.

Upaya pembangunan kembali rumah yang rusak di wilayah terdampak bencana sebisa mungkin tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi juga dijadikan sebagai upaya untuk membangun rumah baru yang tangguh menghadapi bencana. Untuk itu, dalam membangun kembali rumah masyarakat terdampak, perlu adanya sosialisasi, pendampingan, dan konsultasi. Terutama bagi masyarakat yang memilih Reimbursement Mandiri dan Swakelola Mandiri, mengingat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai struktur bangunan yang utuh dan tangguh dalam menghadapi bencana yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Menurut Boen (dalam Mutia, dkk., 2022), selama ini masyarakat dalam membangun rumah sering kali mengabaikan kaidah-kaidah rumah tahan gempa.

Hingga lebih dari satu tahun, korban yang terdampak gempa pada umumnya masih menempati hunian sementara dan belum memperbaiki rumah mereka.

Namun, ada beberapa masyarakat yang memperbaiki rumah mereka dengan skema Reimburse Aplikator, Reimbursement Mandiri, dan Swakelola Mandiri, namun anggarannya masih banyak yang belum dicairkan. Kondisi ini tentu akan berdampak pada masyarakat baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Sebagai tempat tinggal, rumah mencerminkan tingkat kehidupan, kesejahteraan, keselamatan, kepribadian, serta budaya masyarakat. Tidak hanya sebagai infrastruktur tempat tinggal, rumah merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan lingkungan dan satu sama lain. Dari segi hak asasi manusia, mendapatkan rumah layak huni adalah hak warga negara. Rumah akan menjadi penopang dalam keberlangsungan hidup masyarakat, agar seterusnya mereka bisa berpenghidupan yang layak dan bermartabat. Bagi korban penyintas bencana yang telah kehilangan tempat tinggal, terutama bagi mereka yang masih menempati hunian sementara, pemenuhan hak atas tempat tinggal ini menjadi hal penting untuk diprioritaskan.

Jika kita melihat ke belakang, berdasarkan pengalaman dan peristiwa yang telah terjadi, penanganan masalah bencana di daerah seringkali menghadapi keluhan, protes, hingga konflik sosial karena kurangnya kesiapan dan buruknya tata kelola rehabilitasi-rekonstruksi (rehab-rekon) rumah warga terdampak pascagempa. Seperti yang ditulis oleh Erwin dan Indrizal (2014), di Provinsi Sumatera Barat ketika pemerintah daerah menghadapi dan menangani rehabilitasi rekonstruksi pascagempa 2009, pemerintah juga menghadapi keluhan dan protes dari warga terdampak pascagempa 2007 yang belum rampung. Tidak hanya di tingkat daerah, dalam skala nasional penanganan terhadap bencana juga sering

mengalami berbagai permasalahan, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah. Dalam kasus ini, pemerintah dinilai sangat lamban dalam penyelenggaraan penyediaan hunian tetap dengan alasan lambatnya proses penyediaan hunian tetap disebabkan kendala pengadaan dan ketersediaan lahan. Namun, setelah lahan tersedia, proses penyediaan hunian tetap tidak serta-merta berjalan dengan lancar. Secara garis besar, permasalahan penanganan pascabencana lebih disebabkan oleh tidak adanya kesiapan dari berbagai pihak dalam mengambil peran dan kewenangan dalam menjalankan program-program pemulihan pascabencana.

Upaya pemulihan pascabencana tidak cukup jika hanya mengandalkan pemerintah sebagai penanggung jawab seperti yang dituangkan dalam undang-undang. Masyarakat juga memiliki peran penting di dalamnya, baik dalam pengurangan risiko bencana sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, maupun setelah terjadinya bencana. Dalam penelitian Trisnawati (2023), ditemukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kekuatan yang dapat diandalkan dalam pemulihan pascabencana. Pemerintah seringkali tidak memahami bagian tertentu dari suatu masyarakat ketika memahami bencana, sehingga kurang peka dan kurang tertarik terhadap kebutuhan individu dan masyarakat pascabencana dari sudut pandang masyarakat, sesuai dengan pernyataan Dyer dan McGoodwin dalam Pramono (2016). Selain itu, lemahnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah di lokasi bencana juga menjadi persoalan dalam upaya pemulihan bencana.

Sosialisasi mengenai Rumah Tahan Gempa sangat penting dilakukan agar menciptakan pemahaman yang baik bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam menentukan konsep pembangunan kembali rumah mereka juga krusial. Sosialisasi

dan partisipasi dari masyarakat akan membuka jalan bagi mereka untuk memahami konsep Rumah Tahan Gempa sehingga program-program tersebut dapat diterima dengan baik. Hal ini tentu akan menunjang percepatan pembangunan kembali rumah yang mengalami kerusakan.

Pemerintah perlu mempertimbangkan kenyamanan keluarga dalam rumah yang akan dibangun. Menurut Putra dan Hakim (2021), salah satu faktor yang mempengaruhi kenyamanan keluarga dalam menghuni rumah adalah jumlah kamar yang tersedia harus sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang menghuni rumah tersebut, dengan standar luas ideal bagi penghuni memiliki area 9 m² per orang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tentu rumah tahan gempa yang direkomendasikan oleh pemerintah akan diterima lebih baik oleh masyarakat.

Model pembangunan kembali rumah masyarakat korban gempa dengan konsep Domus dan Rumbako melalui skema Reimburse Aplikator kurang diterima masyarakat. Akibatnya, masyarakat lebih memilih untuk membangun kembali dengan cara mandiri meskipun prosedur yang ditempuh sangat rumit dan bermasalah. Selain itu, bentuk rumah yang ditawarkan tidak mampu mewakili budaya dan kepercayaan masyarakat sebagai identitas mereka. Menurut Rapoport (dalam Natsir dan Abidah, 2021), kepercayaan, budaya, dan tradisi yang dianut oleh suatu masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap bentuk rumah masyarakat tersebut. Pilihan dalam menentukan langkah membangun kembali rumah mereka berangkat dari budaya masyarakat itu sendiri yang melahirkan persepsi-persepsi terhadap rumah instan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap permasalahan di atas dari sudut pandang antropologi, yaitu bagaimana persepsi masyarakat Nagari Kajai korban gempa bumi terhadap Rumbako dan Domus, rumah hunian dari program pemerintah. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana perilaku yang muncul dari persepsi tersebut. Pengetahuan dibangun dalam masyarakat dan diinterpretasikan oleh individu, sehingga membentuk pemahaman yang dianggap sebagai nilai-nilai dalam suatu komunitas. Maka, terdapat kemungkinan adanya perbedaan persepsi antara individu dengan yang lainnya, seperti yang terjadi pada masyarakat Nagari Kajai.

Rumbako dan Domus dianggap sebagai suatu inovasi baru di tengah masyarakat. Dengan berbagai informasi yang diberikan pemerintah tentang spesifikasi, kesesuaian antara spesifikasi dengan kebutuhan masyarakat, serta proses pelaksanaannya hingga selesai, hal tersebut menimbulkan berbagai pemahaman yang berbeda dalam masyarakat. Untuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat dalam menentukan pilihan membangun kembali rumah mereka pasca gempa bumi, penulis ingin mengkaji persepsi masyarakat mengenai rumah tahan gempa Rumbako dan Domus. Kajian ini dilakukan agar pemerintah juga mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan kembali rumah masyarakat terdampak bencana, serta mensosialisasikan program tersebut dan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, program-program tersebut dapat berjalan secara efektif, tepat waktu, dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketertarikan penulis mengenai permasalahan tersebut akan disajikan dalam penelitian yang berjudul

"Persepsi Masyarakat Terhadap Rumah Tahan Gempa Rumbako dan Domus: Rekonstruksi Rumah Rusak Berat Korban Gempa Pasaman Barat 2022 (Studi Kasus di Nagari Kajai Kecamatan Pasaman)."

B. Rumusan Masalah

Permasalahan bencana bukanlah suatu permasalahan yang sederhana; realitasnya, permasalahan bencana merupakan suatu kompleksitas. Salah satunya adalah permasalahan bencana gempa bumi. Mulai dari ketika gempa itu terjadi hingga berlalu, berbagai macam permasalahan muncul akibatnya. Dalam upaya pemulihan pasca gempa, sering kali pelaksanaannya mengalami kendala sehingga upaya pemulihan tersebut tidak berjalan semestinya atau tidak mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat yang menjadi korban. Hal ini dapat mendatangkan masalah baru di masa yang akan datang. Gempa bumi memang suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi kedatangannya, sehingga dalam menghadapinya, perilaku-perilaku yang muncul merupakan perilaku yang spontan. Perilaku-perilaku tersebut berangkat dari pengetahuan, pengalaman, dan budaya mereka yang menghadapinya.

Permasalahan yang muncul tidak hanya terkait dengan kerusakan fisik yang diakibatkan oleh gempa bumi itu sendiri, tetapi juga dengan proses pemulihan yang sering kali rumit dan berpotensi menimbulkan ketidaksetujuan di antara masyarakat yang terdampak. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa upaya pemulihan pasca gempa bumi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan psikologis masyarakat yang terdampak. Pengetahuan akan dinamika sosial dan budaya masyarakat menjadi

krusial dalam merancang dan melaksanakan strategi pemulihan yang efektif dan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi lokal sangat penting untuk menghindari kegagalan atau ketimpangan dalam upaya pemulihan.

Nagari Kajai pada bulan Februari 2022 lalu menjadi pusat aktivitas gempa di Pasaman Barat yang mengakibatkan kerusakan permukiman penduduk. Pembangunan kembali permukiman tempat tinggal merupakan suatu respons terhadap bencana gempa bumi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan bantuan berupa dana stimulan yang disalurkan melalui tiga skema, yaitu Reimburse Aplikator, Reimbursement Mandiri, dan Swakelola Mandiri. Dari tiga skema ini, Reimburse Aplikator merupakan skema yang paling instan, di mana masyarakat bisa meninggalkan hunian sementara dan kembali tinggal di rumah mereka masing-masing dalam waktu tidak lebih dari satu bulan. Dalam skema ini, pemerintah memberikan bantuan dengan mendirikan rumah Rumbako dan Domus yang disebut sebagai Rumah Tahan Gempa. Namun, banyak masyarakat yang menolak skema ini dan lebih memilih skema yang memberikan mereka pilihan untuk membangun rumah secara mandiri. Penolakan ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam membangun kembali rumah mereka sebagai respons terhadap bencana gempa bumi. Pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai konsep Rumah Tahan Gempa Rumbako dan Domus akan mengantarkan masyarakat kepada pilihan pembangunan rumah menggunakan konsep *Reimbursement Aplikator* sehingga upaya pembangunan kembali rumah rusak pasca gempa dapat berlangsung secara cepat. Begitu juga sebaliknya, jika

tidak ada pemahaman yang baik terhadap konsep Rumah Tahan Gempa Rumbako dan Domus maka masyarakat cenderung menolak sehingga perilaku yang muncul dalam membangun kembali rumah rusak tersebut cenderung akan memakan waktu yang lama dan terlepas dari kontrol spesifikasi standar rumah tahan gempa. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Rumah Tahan Gempa Rumbako dan Domus di Nagari Kajai?
2. Bagaimana perilaku masyarakat dalam membangun kembali rumah rusak berat akibat gempa bumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan persepsi masyarakat Nagari Kajai terhadap Rumah Tahan Gempa Rumbako dan Domus.
2. Untuk mendeskripsikan perilaku masyarakat Nagari Kajai dalam membangun kembali rumah rusak berat akibat gempa bumi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh dan mempunyai nilai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini memiliki kontribusi dalam mengembangkan khazanah ilmu siosial dan politik khususnya dalam bidang kajian antropologi sosial. Serta dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk kajian-kajian berikutnya yang memiliki keterkaitan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam kepada pemerintah dalam merencanakan kebijakan membangun kembali rumah masyarakat korban gempa sebagai upaya pemulihan pasca bencana yang lebih efektif dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan kumpulan hasil bacaan yang dibahas secara ringkas dari beberapa kajian literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diteliti. Tinjauan Pustaka sangat penting di dalam sebuah penelitian untuk memperjelas dan mempertegas hasil penelitian yang dilakukan.

Pertama, tulisan yang ditulis oleh Dede Mulyanto Jurusan Antropologi Universitas Padjajaran Bandung Tahun 2013 yang berjudul "*Bencana Alam: Suatu Tinjauan Antropologis dengan Kekhususan Kasus-kasus di Indonesia*". Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengulas konsep-konsep mengenai bencana alam yang ada dalam pustaka antropologi. Dalam kepustakaan antropologi sendiri bencana alam merupakan gejala sosial-budaya. Dalam setiap peristiwa bencana, selalu ada keragaman persepsi risiko, perilaku dan kerentanan bencana yang ditampilkan oleh suatu masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sistem nilai dan norma yang merangkai

bahaya-bahaya bencana ke dalam kehidupan dan pola pikir kolektif. Mengapa suatu komunitas bertindak berdasarkan pola tertentu terhadap bahaya alam dan bencana yang ditimbulkannya dapat dicari dan dijawab melalui pemahaman akan sistem budaya itu sendiri. Kebudayaan memiliki peran penting dalam memahami bagaimana orang-orang memandang, memahami, dan bertindak untuk mengenali pertanda, menghadapi atau menghindari, mengurangi dampak, dan upaya memulihkan diri dari bencana.

Keterkaitan tulisan ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada sudut pandang peneliti. Tulisan ini melihat bahwa bencana alam merupakan suatu gejala sosial yang ada pada masyarakat. Begitu juga dengan penelitian ini, melihat bahwa persepsi dan perilaku yang ada pada masyarakat korban gempa di Nagari Kajai setelah terjadinya bencana merupakan suatu gejala sosial. Persepsi terhadap lingkungan baik berupa fisik atau lingkungan sosial sebelum, saat, atau setelah terjadinya bencana berawal dari budaya masyarakat itu sendiri yang dapat membentuk suatu pemahaman berdasarkan apa yang mereka lihat dan alami. Begitu juga dengan perilaku-perilaku masyarakat korban gempa di Nagari Kajai. Nilai dan norma yang dipahami akan menentukan bagaimana masyarakat bersikap dalam menghadapi bencana.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Intan Violetta, Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2022 yang berjudul "*Marepedep Ka Laggai Siburuk: Relokasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai (Studi Kasus di Huntap Dusun Sabeugunggung, Desa Betumonga)*". Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana relokasi

pembangunan hunian tetap sebagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami Mentawai pada tahun 2010. Dalam temuannya, peneliti menemukan berbagai permasalahan dalam relokasi rehabilitasi dan rekonstruksi Huntap Sabeunggu dimana ada masyarakat yang menetap di huntap dan ada masyarakat yang bolak-balik dari lokasi relokasi huntap ke pemukiman lama. Peneliti menemukan bahwa setiap perilaku-perilaku yang mereka tampilkan dipengaruhi oleh pengalaman budaya mulai dari sebelum terjadinya Tsunami, saat terjadinya Tsunami, hidup di tenda pengungsian dan huntara hingga menetap di huntap KM.14. Bagi masyarakat yang memilih menetap di huntap didasari oleh kekhawatiran, rasa takut dan trauma akibat pernah berhadapan langsung dengan gelombang Tsunami. Kemudian mereka yang memilih menetap di Huntap juga didasari oleh adanya pekerjaan baru bagi mereka sehingga tidak perlu kembali lagi ke *laggai* atau pemukiman lama. Bagi mereka memilih bolak-balik disebabkan oleh himpitan perekonomian yang mendorong mereka untuk kembali ke *laggai*. Rasa takut dan trauma mereka hadapi ketika kembali ke *laggai* namun karena tidak ada pilihan lain mereka tetap menjalani kehidupan seperti itu. Alasan lain bagi mereka yang bolak-balik adalah di pemukiman lama mereka mendapatkan sumber air yang jernih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Violetta ialah sudut pandang yang digunakan. Sudut pandang tersebut merupakan sudut pandang antropologi dimana perilaku-perilaku yang muncul sebagai respon terhadap bencana berasal dari nilai-nilai dan norma yang diyakini sebagai acuan hidup atau budaya yang dipelajari mulai dari komunitas kecil yaitu keluarga hingga

komunitas yang lebih kompleks yaitu lingkungan masyarakat. Dalam penelitian Intan Violetta perilaku yang muncul dari masyarakat berasal dari pengalaman budaya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Retnadumillah Saliha dan Darmawati Pakki Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu tahun 2021 yang berjudul “*Kewajiban Pemerintah Menyediakan Hunian Tetap (Huntap) Bagi Korban Gempa Dan Tsunami Di Kab. Donggala*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pemerintah menyediakan Huntap (Hunian Tetap) korban gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala. Menurutnya pemerintah merupakan suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan dalam suatu sistem pemerintahan di kehidupan tatanan sosial masyarakat. Berbagai aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan harus memperhatikan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut memang benar telah tepat sasaran, terlepas dari kelompok kepentingan yang memandang situasi tersebut sebagai peluang untuk memperoleh pandangan yang baik dari masyarakat. Dalam tulisan ini peneliti mengkaji dengan melihat perspektif kajian normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Donggala kurang menjalankan kewajibannya sebagai pemerintah yang hadir menyediakan Huntap (Hunian Tetap) bagi masyarakat, khususnya masyarakat di daerah Loli dan sekitarnya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan yang terjadi seperti adanya benturan kepentingan politik, lemahnya institusi dalam menjalankan program, lemahnya SDM di bidang teknis dan administrative, perbedaan tujuan antara actor yang terlibat, serta dukungan dalam pelaksanaan yang tidak berkelanjutan atau berkesinambungan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wawan Rahmadi dari Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2022, dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju”*. Skripsi tersebut melihat tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam sektor pemukiman serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Temuan dalam skripsi tersebut, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pemukiman korban bencana belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dikatakan belum berjalan dengan baik karena peneliti menemukan berbagai macam permasalahan dalam prosesnya. Hasil temuannya pendataan antar wilayah kurang valid dimana masih banyak masyarakat yang tidak terakomodir karena waktu yang dibatasi dan koordinasi antara implementor tidak berjalan dengan baik sehingga dalam penanganan masalah terjadi miskonsepsi. Meskipun demikian, dalam tahap penyaluran koordinasi antar implementor berjalan dengan baik dimana penjadwalan dapat terkoordinasi dan tersosialisasikan. Kemudian peneliti menemukan bahwa standar dan tujuan dari kebijakan mengenai kebencanaan yang telah diatur dalam undang-undang merupakan faktor penunjang dalam implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pemukiman korban bencana. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah belum adanya aturan terpadu mengenai program ini baik berupa perda maupun perbub, persoalan waktu yang begitu singkat dalam melakukan pendataan juga menjadi hambatan, dan kondisi yang belum kondusif pada tahap awal program. Kesamaan dalam studi

ini terletak pada fokus penelitian terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana dan menerima bantuan pembangunan tempat tinggal.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Desy Lestari dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021, dengan judul *“Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020”*. Tulisan ini mengkaji tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah (BPBD) terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Kemudian tulisan ini juga mengkaji tentang kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi belum berjalan dengan baik karena berbagai permasalahan muncul di lapangan. Salah satu temuan terkait permasalahan dalam pelaksanaan program yaitu persoalan pendataan. Pemerintah berulang kali melakukan pendataan karena tahapan proses pendataan yang berjalan tidak efektif dan efisien. Permasalahan seperti ini akan memakan waktu sehingga program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berjalan sesuai dengan rentang waktu yang diharapkan. Kemudian komunikasi dan koordinasi antar pelaksana program berjalan kurang optimal. Kondisi seperti ini diakibatkan sumberdaya manusianya yang kurang kompeten dan tidak profesional dalam pelaksanaan program. selain itu, masyarakat yang pasif dalam pelaksanaan program juga menjadi hambatan tersendiri dalam tahapan-tahapan pelaksanaan program. Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Alam, dkk (2013) yang berjudul *Upaya*

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program manajemen bencana hanya dapat tercapai apabila mendapatkan dukungan penuh dari semua stakeholder, termasuk masyarakat umum dan anggota pelaksana yang terlibat dalam proses tanggap darurat serta pelaksanaan program.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wen Farizi, dkk. Yang berjudul “*Modal Sosial Sebagai Strategi Pemulihan Pasca Gempa di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara*” dari Universitas Mataram Tahun 2020. Tulisan ini menemukan dan menjelaskan bentuk modal sosial yang dimiliki masyarakat dalam tahap pemulihan pasca bencana di desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan mengangkat kajian teori dan konsep dari James S. Coleman yang mengemukakan teori pilihan rasional.

Dalam temuannya perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi desa Gondang mengalami proses yang lebih cepat dibandingkan dengan desa lain, percepatan ini dikarenakan sinkronisasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Sinkronisasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah tersebut tidak terlepas dari peran modal sosial yang ada pada masyarakat. Modal sosial berupa adanya rasa percaya, nilai-nilai dan jaringan mampu mengakomodir program-program yang ditargetkan oleh pemerintah dengan ikut serta melibatkan masyarakat sebagai aktor utama pemulihan.

Kesimpulan dari tulisan ini bentuk modal sosial yang ada pada masyarakat Gondang Kabupaten Lombok terdiri dari kepercayaan, jaringan, dan norma. Kepercayaan berupa kepercayaan terhadap nilai-nilai agama, pemerintah, sesama anggota, dan relawan. Nilai dan norma yang diterapkan masyarakat yaitu tradisi banjar *gawe mati* dan *gawe idup*, serta tradisi pertanian *subak dan pekasih*. Jaringan yang dimaksud terdiri dari jaringan dalam dan luar masyarakat, jaringan dari dalam masyarakat merupakan relasi dari KWT dan P3A, sementara itu jaringan dari luar masyarakat adalah ACT. Modal sosial masyarakat Desa Godang diwujudkan melalui *Sangkep* (Musyawarah), *Ngibung* (Gotong-royong), dan *Nembakuh* (Kerjasama Membangun Rumah) yang dijadikan sebagai strategi pemulihan pasca bencana gempa bumi.

Berdasarkan tinjauan Pustaka yang sudah dijelaskan, terdapat perbedaan dengan penelitian di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat. Selain lokasi, fokus kajian juga memiliki perbedaan. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana persepsi masyarakat terhadap hunian tetap konsep Rumbako dan Domus yang merupakan program dari pemerintah yang mempengaruhi perilaku-perilaku masyarakat dalam membangun kembali rumah kategori rusak berat akibat bencana gempa.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Hoffman (dalam Mulyanto D 2013) ilmuwan sosial setidaknya sudah delapan puluh tahun melakukan pencarian aspek-aspek sosial budaya dari dampak yang disebabkan oleh bahaya bencana alam dan bagaimana respon dari manusia itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kajian

mengenai kebencanaan mengalami perubahan orientasi. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis kejadian yang menjadi pemicu bencana, sementara penanganan korban bencana saat ini lebih cenderung mengadopsi pendekatan yang menitikberatkan pada dimensi manusia dan masyarakat. Oliver-Smith (dalam Pramono 2016) mengembangkan tiga tema umum dalam riset antropologi mengenai bencana : respon perilaku, perubahan sosial, serta ekonomi/politik lingkungan. Sejak 1980-an antropolog Amerika ini memfokuskan kajiannya pada tema keberhasilan/kegagalan proses pemukiman kembali pasca bencana serta peran antropologi dan antropolog sebagai agensi mengatasi permasalahan ketidakadilan dalam proses tersebut (Anton Novenanto 2015). Dalam perspektifnya disiplin ilmu antropologi berbicara tentang pengelolaan bencana, yang menguraikan keragaman pemahaman, respon dan pola masyarakat lokal menghadapi bencana dan pemahamannya tentang bencana, serta pola dan tanggapan aktor atau organisasi eksternal dalam menanggapi bencana.

Persepsi secara umum merupakan suatu pendapat atau pandangan seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Melalui persepsi seseorang akan mengerti tentang situasi dan keadaan dilingkungkannya maupun tentang individunya sendiri. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting di kehidupan manusia dalam menanggapi atau merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di lingkungannya. Menurut Robbins (2006:3) persepsi merupakan suatu proses yang digunakan individu dalam mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka, meskipun begitu apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif.

Rakhmat (2008:42), mengungkapkan bahwa persepsi merupakan proses mengubah sensasi yang muncul dari suatu proses rangsangan atau stimulus menjadi sebuah informasi yang bermakna. Menurutnya, persepsi merupakan bagian dari komunikasi intrapersonal yang mencakup sensasi, ingatan, dan proses berpikir. Sebagai individu-individu yang bersifat sosialis, manusia secara alami akan menerima rangsangan dari objek di sekitarnya melalui indera, kemudian mengolahnya hingga mencapai suatu kesimpulan tentang rangsangan tersebut. Sedangkan Desidarto dalam Rakhmat (2008;51), menyatakan individu dipengaruhi oleh pengalaman dalam proses persepsinya. Pengalaman terhadap objek atau peristiwa diperoleh melalui penarikan kesimpulan dari informasi dan interpretasi pesan, sementara pemberian makna pada tahap penyimpulan informasi tersebut disebut sebagai persepsi.

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang menangkap rangsangan dari objek atau peristiwa melalui indera, kemudian mengolahnya secara kognitif dengan melibatkan pengalaman, memori, dan kemampuan berpikir individu sehingga akhirnya terbentuklah suatu penilaian terhadap rangsangan tersebut. Penilaian tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, nilai-nilai personal, dan konteks situasional yang ada. Persepsi tidak hanya sekedar penerimaan informasi dari lingkungan melalui indera, tetapi melibatkan pengolahan kognitif yang rumit dalam pikiran individu. Proses ini mencakup penafsiran dan evaluasi terhadap rangsangan yang diterima, yang kemudian membentuk pemahaman atau penilaian terhadap objek atau peristiwa. Terdapat beberapa aspek dalam proses

kognitif yang memungkinkan tiap individu mencapai kesimpulan akhir yang berbeda dalam mempersepsikan objek atau peristiwa yang sama. Aspek-aspek tersebut meliputi faktor-faktor seperti pengalaman sebelumnya, nilai-nilai budaya yang dianut, keyakinan personal, serta konteks sosial dan lingkungan dimana individu berada. Pengakuan akan keragaman interpretasi ini penting karena memungkinkan kita untuk memahami bagaimana berbagai kelompok atau masyarakat mempersepsikan dan memberi makna terhadap dunia mereka secara unik.

Menurut McDowwell & Newel (1996:103) ada dua aspek dalam persepsi, yaitu:

a. Kognitif

Aspek kognitif adalah bagian yang terlibat dalam proses pemikiran, pemahaman, atau penafsiran terhadap rangsangan yang diterima melalui panca indera.

b. Afeksi

Aspek afeksi melibatkan bagaimana seseorang merasakan dan mengekspresikan emosi terhadap rangsangan berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya yang kemudian akan mempengaruhi cara dia memahami sesuatu.

Terkait penelitian mengenai persepsi dan perilaku masyarakat terhadap Rumah Tahan Gempa konsep Rumbako dan Domus, ada beberapa konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu konsep kebudayaan. Kebudayaan dianggap sebagai landasan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti yang disebutkan oleh Goodenough (dalam Marzali 2014:259), kebudayaan



bukanlah sekedar pola perilaku atau hasil fisik dari perilaku, melainkan sistem pengetahuan yang terdapat dalam pikiran manusia. Melalui pengetahuan ini, manusia menggunakan sistem tersebut untuk mengatur dirinya sendiri, baik dalam memahami diri sendiri maupun orang lain. Menurut Spradley (dalam Marzali 2014:259), kebudayaan ialah suatu sistem pengetahuan yang berperan sebagai panduan dan arahan bagi masyarakat dalam perilaku mereka.

Kebudayaan dianggap sebagai sistem pengetahuan menurut Ward Goodenough (Dalam Keesing, 2014:5). Kebudayaan dalam suatu masyarakat adalah kumpulan pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki seseorang agar ia dapat berperilaku sesuai dengan norma yang diterima oleh anggota masyarakat tersebut. Budaya bukanlah sesuatu yang bersifat material; ia tidak terdiri dari objek fisik, manusia, perilaku atau emosi. Tatanan kebudayaan lebih mencerminkan pengelolaan dari hal-hal tersebut. Budaya merujuk pada beragam elemen yang terdapat dalam pemikiran manusia, termasuk pola-pola yang digunakan untuk menerima, mengaitkan, dan menginterpretasikan fenomena materi. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang menetapkan apa yang dianggap, apa yang mungkin menjadi, apa yang dirasakan seseorang tentangnya dan bagaimana cara menghadapinya.

Kebudayaan juga bisa dipahami melalui tiga cara, pertama, melalui pengalaman hidup dalam menghadapi lingkungan, yang memungkinkan manusia memilih tindakan yang sesuai dengan lingkungan dan tujuan yang diinginkan berdasarkan pengalaman tersebut. Kedua, melalui pengalaman dan interaksi sosial dan kehidupan bersama masyarakat. Ketiga melalui petunjuk-petunjuk yang

bersifat simbolis atau melalui komunikasi simbolis (Suparlan 1992:79). Kebudayaan merupakan salah satu elemen yang membentuk persepsi manusia. Budaya merupakan salah satu dari banyak faktor internal yang mempengaruhi persepsi. Adanya nilai dan sistem yang dipercayai dalam sebuah budaya, menjadikan budaya sebagai salah satu faktor yang dapat membentuk persepsi. Seperti halnya dalam upaya pembangunan rumah rusak pasca bencana. Setiap individu memiliki pengetahuan dalam melihat rumah sebagai suatu aspek penting dalam kehidupan. Rumah diartikan sebagai tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun dalam melihat dan memaknai rumah tahan gempa konsep Rumbako dan Domus terdapat perbedaan. Ada yang memaknai sebagai suatu solusi efektif dan tidak efektif dalam menggantikan rumah sebelumnya untuk kehidupan yang berkelanjutan. Kemudian dari hal itu muncul tindakan oleh manusia itu sendiri dalam membangun rumah berdasarkan kemampuan naluriannya. Manusia tidak hanya bertindak sesuai dengan aspek biologisnya saja, melainkan semuanya harus dipelajari terlebih dahulu (Suryatna, 1996:27).

Kemudian konsep perilaku masyarakat dalam membangun kembali rumah mereka tentu berkaitan pula dengan konsep kebudayaan. Perilaku adalah cara individu bereaksi, bertindak atau berinteraksi dalam situasi tertentu. Ini mencakup segala macam aktivitas yang dilakukan, baik yang terlihat secara fisik maupun bersifat mental. Perilaku mencerminkan respon individu terhadap berbagai rangsangan dari lingkungan internalnya sendiri, seperti pemikiran, emosi, dan dorongan. Sedangkan menurut Skinner (dalam Rohani, 2007:12) perilaku adalah tanggapan atau respon seseorang terhadap rangsangan atau stimulus eksternal.

Kemudian menurut Suryatna (1996:27), perilaku atau tingkah laku adalah ekspresi individu yang termanifestasi saat berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Banyak sekali perilaku yang sementara, yang berarti berlaku hanya pada suatu tempat atau waktu khusus namun tidak berlaku pada tempat dan waktu lain. Perilaku masyarakat dalam membangun kembali rumah rusak akibat bencana misalnya, di waktu dan tempat tertentu ada masyarakat yang mengindahkan pembangunan kembali rumah mereka berdasarkan arahan pemerintah dan ada yang ingin membangun kembali rumah mereka berdasarkan apa yang mereka pahami dan apa yang mereka inginkan.

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pernyataan Skinner dan Suyatna adalah bahwa perilaku yang ditampilkan masyarakat saat membangun kembali rumahnya merupakan tindakan yang muncul oleh bagaimana seorang individu memaknai rumah tahan gempa konsep Rumbako dan Domus sebagai tempat tinggal yang dipengaruhi oleh persepsinya. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan konsepsi individu dalam memaknai rumah tahan gempa konsep Rumbako dan Domus. Karena adanya pengetahuan mengenai rumah tahan gempa konsep Rumbako dan Domus mulai dari spesifikasi, bahan material yang digunakan hingga bentuk rumah itu sendiri dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku dan memberikan tindakan dalam arti membangun kembali rumah rusak akibat bencana.

Banyaknya rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi serta lambatnya proses pembangunan kembali rumah rusak berat menjadi alasan peneliti untuk melihat persepsi masyarakat terhadap rumah tahan gempa Rumbako dan Domus. Dalam penyelesaiannya rumah tahan gempa Rumbako dan Domus

terbilang cepat pembangunannya, namun masyarakat menolak rumah tersebut dengan lebih memilih membangun sendiri rumah sesuai keinginan mereka yang regulasinya memakan waktu cukup lama. Hal ini menjadi fokus kajian peneliti yang kemudian dianalisis menggunakan konsep kebudayaan sebagai suatu sistem pengetahuan, yang menekankan pada pengungkapan perspektif individu masyarakat korban bencana dan penerima dana stimulan pembangunan kembali rumah rusak berat di Nagari Kajai.

Dari konsep-konsep yang telah dijelaskan diatas maka peneliti menggunakan teori kebudayaan dari Goodenough. Menurutnya, Ward Goodenough (dalam James P. Spradley, 2006) budaya masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui dan dipercaya seseorang agar dia dapat berperilaku sesuai dengan cara yang diterima oleh masyarakat. Budaya bukanlah sesuatu yang berwujud materi; ia tidak terdiri dari barang/materi, manusia, dan tindakan, atau perasaan. Ia merupakan suatu konsep yang dimiliki manusia dalam pikiran mereka, suatu pola yang mereka gunakan untuk memahami, menghubungkan, dan kemudian menafsirkan unsur-unsur tersebut.

Orang-orang yang mengikuti aliran kognitif berpendapat bahwa setiap masyarakat memiliki sistem yang khas dalam cara mereka melihat dan menyusun fenomena materi, seperti benda-benda, peristiwa, tingkah laku, dan sebagainya. Oleh karena itu penelitian dalam bidang antropologi bukanlah tentang fenomena material itu sendiri, melainkan tentang bagaimana fenomena tersebut diatur dalam pikiran manusia. Jadi, secara sederhana, budaya terdapat dalam pikiran manusia,

dan manifestasinya adalah organisasi pola pikir tentang fenomena material (James P. Spradley, 2006).

Dari penjelasan diatas peneliti mampu menggambarkan persepsi masyarakat dan perilaku yang ditampilkan dalam mencapai tujuan yakni memahami persepsi masyarakat tentang rumah tahan gempa konsep Rumbako dan Domus serta mendeskripsikan perilaku masyarakat korban gempa dalam membangun kembali rumah rusak berat.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2014:209), penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis data informasi dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya di lapangan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi atau mengklasifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada (Samsu, 2021: 63). Dengan demikian, melalui pendekatan tersebut penulis mampu menggambarkan dan mendeskripsikan Persepsi masyarakat terhadap rumah tahan gempa Rumbako dan Domus, kemudian juga dapat menggambarkan dan mendeskripsikan perilaku-perilaku masyarakat dalam membangun kembali rumah mereka yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi. Penulisan kualitatif biasanya digunakan dalam penulisan sosial atau kemanusiaan.

Pendekatan studi kasus membantu penulis agar dapat fokus pada tema penulisan karena dibatasi oleh waktu dan tempat yang lebih spesifik. Menurut

Creswell (2015:135), pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan di mana peneliti mengeksplor kehidupan nyata dalam berbagai kasus dengan mengumpulkan data yang rinci dan mendalam melibatkan berbagai sumber informasi seperti pengamatan, wawancara, audiovisual, dokumen, dan laporan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih sebagai tempat fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif (sengaja), dengan alasan Nagari Kajai adalah salah satu Nagari yang terkena dampak parah akibat bencana gempa bumi. Jumlah rumah yang mengalami kerusakan parah di Nagari Kajai sebanyak 234 unit. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Nagari lainnya yang berada di Kecamatan Talamau sebagai pusat terjadinya gempa bumi. Banyak di antara masyarakat Kajai yang terdampak lebih memilih membangun kembali rumah mereka secara mandiri daripada memilih rumah tahan gempa Rumbako dan Domus.

Tabel 1.
Skema Pembangunan Rumah Rusak Berat di Nagari Kajai

No.	Skema Pembangunan Rumah	Jumlah
1	Reimburse Aplikator	67
2	Reimbursement Mandiri	122
3	Swakelola Mandiri	45
Total		234

Sumber : Dikembangkan Dari BPBD Pasaman Barat 2023

3. Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan satu hal yang sangat penting dalam penelitian. Berbagai sumber informasi terkait topik penelitian yang dilakukan diperoleh dari informan penelitian. Moelong (2011: 132), menyebutkan bahwa informan merupakan seseorang yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber yang memberikan informasi penting terkait permasalahan yang diteliti. Informan juga dianggap sebagai orang yang mengerti dan memiliki pengetahuan mendalam terkait masalah penelitian yang secara sukarela bersedia terlibat memberikan informasi yang diperlukan terkait masalah penelitian.

Pemilihan informan dilakukan dengan Teknik *purposive sampling*, yang merupakan suatu Teknik pemilihan informan dengan pertimbangan kriteria informan tertentu namun tetap memperhatikan keterpenuhan data sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini (Irawan 2006). Orang-orang yang dapat dijadikan informan dalam penelitian ini adalah mereka yang rumahnya mengalami kerusakan berat serta mereka yang terlibat dalam rekonstruksi rumah rusak berat akibat gempa di Nagari Kajai Pasaman Barat.

Berdasarkan itu, peneliti telah mewawancarai beberapa masyarakat di Nagari Kajai yang sesuai dengan kriteria informan penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Berikut daftar informan yang telah peneliti wawancarai sesuai dengan kriteria informan penelitian.

Tabel 2.
Informan Penelitian

No.	Nama	Usia (Tahun)	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Pembangunan Rumah
1	Syafri Kamil	64	Petani	Laki-laki	Reimburse Aplikator (Domus)
2	Darlius	73	Petani	Laki-laki	Reimburse Aplikator (Domus)
3	Nur Asni	36	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Swakelola Mandiri
4	Romi Kurniawan	42	Pedagang	Laki-laki	Reimburse Aplikator (Rumbako)
5	Yulinda	53	Penjahit	Perempuan	Reimbursement Mandiri
6	Syafei	47	Tukang Ojek	Laki-laki	Swakelola Mandiri
7	Neneng	39	Pedagang	Perempuan	Reimburse Aplikator (Rumbako)
8	Ujang Suali	60	Petani	Laki-Laki	Reimbursement Mandiri
9	Nurhayati	32	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Swakelola Mandiri
10	Fero	30	Sekretaris Nagari	Laki-laki	-
11	Julianto	32	Wiraswasta	Laki-laki	Reimbursement Mandiri
12	Fitriani	35	Wiraswasta	Perempuan	Swakelola Mandiri

4. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara pengumpulan data merujuk pada metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh melalui penerapan metode yang telah ditetapkan:

- 1) Observasi yaitu Teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung turun ke lapangan. Pengamatan merupakan Teknik mengumpulkan data atau informasi

yang diamati saat di lapangan dan mencatatnya ke dalam buku catatan lapangan (Creswell 2015:222). Pengamatan ini dilakukan dengan panca indra dan dibantu dengan instrument atau perangkat dan merekamnya untuk keperluan ilmiah. Dengan pengamatan peneliti dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang ada atau terjadi di lapangan. Saat observasi, peneliti mengamati aktivitas masyarakat dan pemerintah dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

- 2) Studi Literatur yaitu serangkaian kegiatan mengumpulkan data melalui pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan-bahan penelitian.
- 3) Metode pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara yang digunakan untuk mendapat informasi atau keterangan terhadap suatu hal tertentu dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Wawancara dalam penulisan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian mereka (Koentjaraningrat, 1983). Menurut sugiyono (2018: 140) wawancara merupakan perbincangan guna memberikan informasi atau data yang diperlukan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan narasumber. Dalam wawancara peneliti akan mengajukan pertanyaan terbuka dan bagi informan diberi kesempatan untuk menceritakan pengalamannya dengan nyaman tanpa merasa canggung.
- 4) Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan semua informasi terkait penelitian yang diperoleh di lapangan.

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan agar memperoleh data atau informasi dalam bentuk rekaman, gambar, arsip dan lainnya. Dokumentasi merupakan suatu kebutuhan sebagai penunjang dalam melakukan observasi dan wawancara pada informan.

5. Analisis Data

Analisis data melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk analisis, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data, dengan tujuan memberikan nilai sosial, akademis, dan ilmiah pada sebuah fenomena. Semua data yang diperoleh dari lapangan melalui sumber-sumber hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan dengan menyiapkan dan melakukan pengelompokan data baik data dalam bentuk teks, hasil dokumentasi maupun rekaman atau gambar untuk di analisis yang kemudian data tersebut direduksi menjadi tema pengkodean, peringkasan dan menyajikan data dalam bentuk bagan, table, ataupun pembahasan (Creswell, 2015: 251).

- 1) Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih informasi yang esensial, serta memusatkan perhatian pada aspek yang signifikan, dengan menemukan tema dan pola yang terkandung. Melalui langkah-langkah tersebut, data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih terperinci, memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya, dan memfasilitasi pencarian informasi kembali jika diperlukan (Sugiyono, 2014: 247). Dalam penelitian ini, reduksi data merujuk pada proses pengumpulan informasi sebanyak mungkin dari para informan terkait upaya pemerintah dan

masyarakat dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cermat untuk menyeleksi aspek-aspek pokok, memfokuskan perhatian pada hal-hal yang esensial.

- 2) Penyajian Data merujuk pada tindakan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, diagram, relasi antar kategori, flowchart, dan jenis presentasi lainnya. Penyajian data tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman mengenai situasi atau informasi yang disampaikan, serta merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut (Sugiyono, 2014: 249).
- 3) Verifikasi data merupakan suatu proses penarikan kesimpulan yang melibatkan analisis lanjutan setelah melakukan reduksi data dan menampilkan data, sehingga memungkinkan penyimpulan data dan peneliti masih memiliki kesempatan untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara tetap dapat diuji kembali di lapangan guna mencapai kebenaran ilmiah.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tahap pertama yang penulis lakukan adalah observasi awal yang dimulai sejak bulan Maret 2023. Dalam observasi awal ini peneliti langsung mendatangi lokasi penelitian dan melakukan pengamatan terhadap proses pembangunan kembali rumah masyarakat korban gempa. Peneliti juga mendatangi kantor Wali Nagari sebagai akses pertama untuk bisa berbaur dengan masyarakat yang akan diteliti. Proses ini berjalan dengan lancar karena petugas Wali Nagari menyambut baik kedatangan penulis.

Pada observasi awal ini peneliti ditemani oleh sekretaris Nagari untuk menyusuri lokasi pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan berat. Peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan sekretaris Nagari terkait pembangunan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan berat. Setelah itu penulis mencari data sekunder terkait permasalahan tersebut.

Setelah melakukan wawancara singkat dan mencari data sekunder, penulis mulai mendatangi rumah-rumah masyarakat yang mengalami kerusakan berat tersebut sesuai dengan yang ditelusuri bersama sekretaris Nagari sebelumnya. Penulis melakukan wawancara singkat dengan masyarakat terkait permasalahan pembangunan rumah rusak berat akibat bencana gempa bumi. Penulis bersama dosen pembimbing akademik mulai mendiskusikan permasalahan di Nagari Kajai untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Setelah disetujui, penulis mulai melengkapi persyaratan administrasi untuk lanjut ke tahap penulisan proposal termasuk mencari dosen pembimbing yang akan mendampingi penulis dalam penulisan skripsi.

Pada tahap selanjutnya, penulis mulai menulis proposal untuk diseminarkan sebagai salah satu tahapan dalam penulisan skripsi. Dalam tahapan ini penulis kembali melakukan observasi dan mengumpulkan data yang diperlukan terkait proposal tersebut. Melalui beberapa kali bimbingan dan perbaikan, akhirnya proposal penulis disetujui untuk diseminarkan pada tanggal 15 Januari 2024.

Penulis melanjutkan tahapan berikutnya dengan melakukan penelitian lapangan untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Februari 2024, berlangsung selama tiga bulan hingga April 2024. Selama proses penelitian lapangan peneliti didampingi dan dibantu oleh perwakilan Wali Nagari Kajai. Rangkaian proses penelitian lapangan berjalan dengan baik. Setelah memperoleh data dari lapangan, peneliti kembali melanjutkan penulisan skripsi dan menyaring data dan informasi mana yang relevan dengan topik penelitian.

Selama proses penulisan skripsi, peneliti berkoordinasi dengan dosen pembimbing jika ada kendala atau keraguan. Setelah beberapa kali bimbingan dan melakukan perbaikan skripsi, selanjutnya penulis sampai pada tahap disetujuinya skripsi penulis untuk diuji. Skripsi penulis disetujui pada tanggal 10 Juni 2024 oleh pembimbing II dan tepat satu bulan kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 disetujui oleh pembimbing I setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan. Kemudian pada tanggal 29 Juli penulis melaksanakan ujian skripsi.



